Upaya Pengentasan Kemiskinan Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia

Sri Endang Rahayu^{1*} & Hastina Febriaty²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*E-mail : sriendang@umsu.ac.id

Abstract : *This study aims to analyze poverty alleviation efforts in Indonesia in relation to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research focuses on examining poverty trends, identifying influencing factors, and evaluating government policies related to poverty reduction during the 2004–2023 period. The research uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. The independent variables include the unemployment rate, income inequality (Gini Ratio), and Human Development Index (HDI), while the dependent variable is the poverty rate. The results of the study show that 1) the open unemployment rate (TPT) has a positive and significant effect on the poverty rate in Indonesia, 2) the income inequality rate has a negative and insignificant effect on the poverty rate in Indonesia and 3) the human development index (HDI) has a negative and significant effect on the poverty rate in Indonesia. In addition, Although the overall poverty rate has declined, structural challenges such as inequality and human capital quality remain obstacles. Therefore, strengthening inclusive social policies, improving education and health services, and creating sustainable employment are key strategies to accelerate the achievement of the SDGs in Indonesia.*

Keyword : *Poverty; SDGs; Unemployment; Inequality; HDI*

Submit:

Review:

Publish:

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dalam kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi perkembangan kemiskinan, analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta evaluasi kebijakan pemerintah terkait pengentasan kemiskinan selama periode 2004–2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel dependen adalah tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan 1) tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, 2) tingkat ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dan 3) indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara umum, tantangan struktural seperti ketimpangan dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala. Oleh karena itu, penguatan kebijakan berbasis inklusi sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.

Kata Kunci : Kemiskinan; SDGs; Pengangguran; Ketimpangan; IPM

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan klasik sekaligus persoalan fundamental dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, akan terus menjadi persoalan yang aktual dari masa ke masa. Walaupun sampai sekarang ini belum ditemukan rumusan atau formulasi penanganan kemiskinan yang dianggap paling berdayaguna, signifikan dan relevan (Rahayu & dkk, 2020). Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang (Hastina Febriaty & Nurwani, 2017). Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik dari sisi pangan, sandang, perumahan, pendidikan, maupun kesehatan. Menurut (MP Todaro, 2015), kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut (ketika pendapatan berada di bawah garis kemiskinan) dan kemiskinan relatif (dibandingkan dengan standar hidup masyarakat umum).

Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif dalam dua dekade terakhir, persoalan kemiskinan belum juga bisa diselesaikan secara menyeluruh. Data dari (BPS, 2024) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, khususnya di daerah tertinggal dan pedesaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup inklusif untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan usia produktif. Pengangguran adalah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak (Sri Endang Rahayu; dkk, 2016). Pengangguran yang tinggi menyebabkan berkurangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan (Sukirno, 2014). Tanpa akses pada lapangan kerja yang layak, masyarakat kesulitan memperoleh penghasilan tetap, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Selain itu, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi persoalan serius. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan dapat menggunakan indeks Gini (koefisien gini). Koefisien gini adalah Koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1 yang menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan. Semakin kecil (mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi pendapatannya, semakin besar (mendekati satu)

koefisiennya pertanda semakin timpang/senjang distribusi pendapatannya (Rahayu & dkk, 2020). Ketimpangan yang tinggi mencerminkan distribusi kekayaan yang tidak merata, yang menghambat penurunan kemiskinan meski ekonomi tumbuh (Jhingan M.L, 2016).

Indeks Gini Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi di kisaran 0,38, yang mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata antara kelompok kaya dan miskin, maupun antarwilayah. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan angka kemiskinan.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Rendahnya IPM berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (UNDP, 2020). Di banyak wilayah, terutama di luar Pulau Jawa, IPM masih rendah akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Ketika kualitas SDM rendah, kemampuan masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan pun menjadi terbatas.

Lebih lanjut, kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif, terutama dalam menjangkau masyarakat miskin secara berkelanjutan dan terukur. Program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur belum cukup terintegrasi dengan tujuan jangka panjang seperti yang dicita-citakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya *tujuan pertama: No Poverty*. SDGs merupakan agenda pembangunan global yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dengan 17 tujuan utama. Tujuan pertama adalah “*No Poverty*” (Tanpa Kemiskinan), yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030. Dalam konteks Indonesia, pemerintah berkomitmen mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan berbagai program strategis nasional. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian SDGs bidang kemiskinan di Indonesia antara lain: 1) Persentase penduduk miskin, 2) Akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), 3) Rasio cakupan jaminan social, dan 4) Ketimpangan pendapatan (Gini ratio). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan kemiskinan, faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, serta bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT), ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap

tingkat kemiskinan di Indonesia, serta mendeskripsikan relevansinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Penelitian ini bersifat nasional dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahunan dari tahun 2004 hingga 2024, sehingga waktu penelitian disesuaikan dengan ketersediaan dan pengolahan data statistik tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari: Badan Pusat Statistik (BPS), dan Laporan UNDP terkait IPM dan SDGs.

Analisis dilakukan dengan dua tahap yaitu :

- Analisis Deskriptif, untuk menggambarkan perkembangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan IPM dari tahun ke tahun serta kaitannya dengan SDGs.
- Analisis Regresi Linier Berganda, dimana Regresi Linier Berganda merupakan persamaan yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan beberapa variabel independen (Hafni, 2024). Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$$KM = \beta_0 + \beta_1 TPT + \beta_2 KP + \beta_3 IPM + \varepsilon$$

Keterangan:

- KM = Tingkat kemiskinan (Persen)
- TPT = Tingkat pengangguran terbuka (Persen)
- KP = Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia (skor Indeks 1-100)
- β_0 = Intersep
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel
- ε = Error term

Pengujian dilakukan dengan bantuan software statistik yaitu EViews, dengan uji-t, uji-F, dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif Tingkat Kemiskinan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Di Indonesia, kemiskinan telah menjadi masalah kronis sejak tahun 1960-an, dan kondisi ini semakin diperburuk oleh krisis yang terjadi pada tahun 1998.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ketimpangan Pendapatan dan IPM di Indonesia Tahun 2015-2024

Tahun	Kemiskinan (Persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	IPM (Skor Indeks)
2015	11,13	6,18	0,40	69,55
2016	10,70	5,61	0,414	70,18
2017	10,12	5,50	0,391	70,81
2018	9,82	5,34	0,384	71,39
2019	9,22	5,28	0,380	71,92
2020	9,78	7,07	0,385	71,94
2021	9,71	6,49	0,381	72,29
2022	9,57	5,83	0,381	74,91
2023	9,36	5,32	0,388	74,39
2024	8,57	4,91	0,381	75,02

Sumber : BPS, 2025.

Jika dilihat data kemiskinan di Indonesia 10 tahun terakhir dari tahun 2015-2024 mengalami trend penurunan. Tahun 2015 tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 11,13 % dan terus mengalami penurunan persentasenya menjadi 8,57% di tahun 2024. Hanya di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini disebabkan adanya wabah Covid-19. Namun di tahun berikutnya sudah mengalami penurunan.

Jika dilihat dari persentase tingkat kemiskinan mengalami trend penurunan, namun jika dilihat dari jumlah penduduk miskinnya ternyata masih dikatakan cukup banyak, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Di tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,9 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan 9,36% dan di tahun 2024 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 25,22 juta jiwa dan persentase tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 8,57%. Inilah kenyataannya bahwa jumlah penduduk Indonesia meningkat setiap tahunnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Seseorang yang memiliki pendidikan yang baik maka membuka peluang yang besar untuk mendapatkan kerja yang bagus dan layak yang akan memberikan pendapatan lebih baik, sehingga kesejahteraannya meningkatkan dan keluar dari kemiskinan. Tetapi masih ada permasalahan yang terjadi pada masyarakat yakni yang belum bekerja dan yang sedang mencari kerja. Inilah yang menimbulkan adanya angka tingkat pengangguran terbuka. Masalah ini timbul karena tidak adanya keseimbangan antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja yang pada akhirnya tidak dapat menyerap semua tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka ini mencerminkan seberapa besar angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja. Pengangguran juga lebih banyak terjadi di kalangan pemuda, terutama mereka yang berusia 15-24 tahun, yang mencerminkan tantangan dalam memasuki pasar kerja.

Jika dilihat dari tabel 1, jumlah TPT di Indonesia mengalami trend penurunan dari tahun 2015-2024, dimana tahun 2015 TPT di Indonesia sebesar 6,18% menjadi 4,91% di tahun 2024. Hanya di tahun 2020 TPT di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini juga disebabkan adanya wabah Covid-19, dengan banyaknya pengeringan tenaga kerja pada saat itu.

Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari nilai koefisien gini. Jika dilihat dari data pada tabel 1, nilai koefisien gini di Indonesia diantara 0,381-0,40, dimana tahun 2015 sebesar 0,40 yang artinya distribusi pendapatan di Indonesia semakin timpang. Dan mengalami trend penurunan hingga tahun 2024 menjadi sebesar 0,381 yang menunjukkan semakin merata di bandingkan tahun 2015 sebesar 0,40 dan tahun 2016 yang mencapai 0,414.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah indeks Pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mencerminkan peluang yang dimiliki penduduk suatu wilayah untuk mengakses manfaat dari pembangunan. Indeks ini mencakup hak-hak dasar yang berkaitan dengan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya. IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen fundamental dari kualitas hidup. Jika dilihat pada tabel 1, IPM di Indonesia mengalami trend peningkatan, artinya kualitas hidup masyarakat dan pembangunan yang diupayakan pemerintah mengalami peningkatan. Tahun 2015 IPM Indonesia sebesar 69,55 menjadi sebesar 75,02 di tahun 2024.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun hasil regresi linier berganda dengan menggunakan eviews dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.27304	13.41670	1.361962	0.1910
TPT	1.365975	0.273727	4.990275	0.0001
KP	-1.294834	14.00087	-0.092482	0.9274
IPM	-0.214897	0.112566	-1.909075	0.0733
R-squared	0.905439	Mean dependent var	12.12619	
Adjusted R-squared	0.888751	S.D. dependent var	2.867944	
S.E. of regression	0.956573	Akaike info criterion	2.918724	
Sum squared resid	15.55554	Schwarz criterion	3.117680	
Log likelihood	-26.64660	Hannan-Quinn criter.	2.961902	
F-statistic	54.25917	Durbin-Watson stat	1.333514	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : data diolah, 2025.

Hasil regresi pada tabel 2 di atas, terdapat masalah bahwa hanya ada 1 variabel bebas yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat tingkat kemiskinan (KM) dengan nilai probabilitas 0,0001 ($\alpha < 0,05$). Sedangkan variabel bebas yang lain yaitu ketimpangan pendapatan (KP) dan indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat tingkat kemiskinan (KM) atau signifikansi diatas 5% ($\alpha > 0,05$). Dan dari hasil regresi tersebut menghasilkan nilai *R-squared* yang tinggi yaitu sebesar 0.905439, artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi. Oleh sebab itu, maka dilakukan regresi kembali dengan menggunakan logaritma natural (LN).

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda Setelah di Logaritma Natural

Dependent Variable: LOG(KM)
Method: Least Squares
Date: 05/24/25 Time: 09:26
Sample: 2004 2024
Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.131781	2.621899	2.720083	0.0146
LOG(TPT)	0.775353	0.145532	5.327708	0.0001
LOG(KP)	-0.074261	0.347447	-0.213735	0.8333
LOG(IPM)	-1.460407	0.617291	-2.365831	0.0301
R-squared	0.902021	Mean dependent var		2.470207
Adjusted R-squared	0.884731	S.D. dependent var		0.226706
S.E. of regression	0.076970	Akaike info criterion		-2.121168
Sum squared resid	0.100714	Schwarz criterion		-1.922212
Log likelihood	26.27227	Hannan-Quinn criter.		-2.077990
F-statistic	52.16894	Durbin-Watson stat		1.135754
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : data diolah, 2025.

Setelah dilakukan logaritma natural, hasil regresinya dapat dilihat pada tabel 3, ditemukan bahwa hanya variabel ketimpangan pendapatan (KP) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (KM) dimana nilai probabilitas sebesar 0,8333 ($\alpha > 0,05$). Sedangkan variabel TPT dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (KM) dimana nilai probabilitas TPT sebesar 0,0001 ($\alpha < 0,05$) dan nilai probabilitas IPM sebesar 0,0301 ($\alpha < 0,05$). Dan dari hasil regresi tersebut menghasilkan nilai *R-squared* yang tinggi yaitu sebesar 0.902021, yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi yaitu sebesar 90,2021%. Selanjutnya dilakukan uji asumsi Klasik.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 05/24/25 Time: 10:46
Sample: 2004 2024
Included observations: 21

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.874352	24367.57	NA
LOG(TPT)	0.021180	278.6737	4.214882
LOG(KP)	0.120719	414.1791	3.762139
LOG(IPM)	0.381048	24477.74	1.522125

Sumber : data diolah, 2025.

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 di atas, nilai Centered VIF dari semua variabel bebas bernilai dibawah 10 (Centered VIF < 10). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model ini. Oleh karena itu, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

b. Uji Normalitas

Sumber : data diolah, 2025.

Gambar 1. Uji Normalitas

Dari gambar 1 di atas, hasil uji Jarque-Bera, nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,059109, diatas 0,05 (probability jarque-bera > 0,05) dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.868516	Prob. F(8,12)	0.1586
Obs*R-squared	11.64870	Prob. Chi-Square(8)	0.1676
Scaled explained SS	14.26589	Prob. Chi-Square(8)	0.0751

Sumber : data diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 5, diperoleh p value yang ditunjukkan oleh nilai Prob. Chi-Square (8) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,0751. Oleh karena p value $0,0751 > 0,05$ maka hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.084993	Prob. F(2,15)	0.1589
Obs*R-squared	4.568063	Prob. Chi-Square(2)	0.1019

Sumber : data diolah, 2025.

Hasil uji autokorelasi pada tabel 6, nilai p value ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi-Square (2) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,1019. Dimana nilai p value $0,1019 > 0,05$ maka tidak terjadi masalah autokorelasi.

Interpretasi Hasil

Dari hasil regresi maka model ekonometrikanya yaitu:

$$KM_t = \beta_0 + \beta_1 TPT_t + \beta_2 KP_t + \beta_3 IPM_t + \epsilon_t$$

Interpretasi hasil model sebagai berikut:

$$KM_t = 7,131718 + 0,775353TPT_t + (-0.074261) KP_t + (-1,460407) IPM_t + \epsilon_t$$

Koefisien $\beta_0 = 7,131718$, artinya bahwa jika tingkat pengangguran terbuka (TPT), ketimpangan pendapatan (KP), dan indeks pembangunan manusia (IPM) diabaikan maka diperkirakan tingkat kemiskinan (KM) akan bertambah sebesar 7,131718%, dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai propabilitasnya sebesar 0.0146 ($\alpha < 0,05$) yang berarti signifikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa benar jika prediksi tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 7,131718% jika mengabaikan variabel bebas di atas.

Koefisien $\beta_1 = 0,775353$, artinya jika tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat 1% maka kemiskinan (KM) akan meningkat sebesar 0,775353%. Dan jika dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,0001 ($\alpha < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (KM).

Koefisien $\beta_2 = -0,074261$, artinya jika ketimpangan pendapatan (KP) meningkat 1% maka kemiskinan (KM) akan menurun sebesar 0,074261%. Dan jika dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,8333 ($\alpha > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan (KP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (KM).

Koefisien $\beta_3 = -1,460407$, artinya jika indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat 1% maka kemiskinan (KM) akan menurun sebesar 1,460407%. Dan jika dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,0301 ($\alpha < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (KM).

Uji t

Pada Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi uji signifikansi parsial, yaitu:

1. Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki nilai t-statistic sebesar 5,327708 lebih besar dari t-tabel 2,10092, sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0001 yang mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat kesalahan sebesar 5 persen ($0,0001 < 0,05$) artinya variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Variabel ketimpangan pendapatan (KP) memiliki nilai t-statistic sebesar -0,213735 lebih kecil dari t-tabel 2,10092, sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,8333 yang mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat kesalahan sebesar 5 persen ($0,8333 > 0,05$) artinya variabel ketimpangan pendapatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Variabel indeks Pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai t-statistic sebesar -2,365831 lebih kecil dari t-tabel 2,10092. Sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0301 yang mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat kesalahan sebesar 5 persen ($0,0301 < 0,05$) artinya variabel IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Uji F

Pada Tabel 3 hasil regresi setelah dilakukan logaritma natural, nilai Probabilitas F-statistic sebesar 0,0000 dan nilai nilai F-statistic 52,16894, dengan nilai $\alpha = 5\%$, maka Prob. F-Statistic < nilai α , maka tingkat pengangguran terbuka (TPT), ketimpangan pendapatan (KP) dan indeks

pembangunan manusia (IPM) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan (KM) di Indonesia.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil regresi nilai *R-Square* sebesar 0.902021, artinya bahwa secara bersamaan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT), ketimpangan pendapatan (KP), dan indeks Pembangunan manusia (IPM) sebesar 90,2021% menjelaskan variabel tingkat kemiskinan (KM) di Indonesia. Sedangkan sisanya 9,7979% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan

Penelitian yang dihasilkan bahwa variabel TPT memiliki nilai t-statistic sebesar 5,327708 lebih besar dari t-tabel 2,10092, sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0001 yang mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat kesalahan sebesar 5 persen ($0,0001 < 0,05$) artinya variabel TPT secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aini & Nugroho, 2023) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2020. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maryam dkk, 2023) yang menyimpulkan bahwa secara parsial variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Dan sesuai dengan penelitian (Karolinska et al., 2023) yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan (KP) Terhadap Kemiskinan

Variabel ketimpangan pendapatan memiliki nilai t-statistic sebesar -0,213735 lebih kecil dari t-tabel 2,10092. Sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,8333 yang mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat kesalahan sebesar 5 persen ($0,8333 > 0,05$) artinya variabel ketimpangan pendapatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kasman et al., 2013) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Namun penelitian ini berlawanan dengan penelitian (Maskur et al., 2023) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang berlawanan yaitu hasil penelitian dari (Di et al., 2024), dimana hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat ketimpangan ekonomi dengan tingkat

kemiskinan. Artinya semakin besar kesenjangan ekonomi maka semakin tinggi pula angka kemiskinan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan

Variabel indeks Pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai t-statistic sebesar -2,365831 lebih kecil dari t-tabel 2,10092. Sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0301 yang mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat kesalahan sebesar 5 persen ($0,0301 < 0,05$) artinya variabel IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurlaili et al., 2023) dimana berdasarkan hasil analisis penelitian bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sejalan juga dengan penelitian (Zahra & dkk, 2024) yang menyimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Namun penelitian ini tidak berlawanan dengan hasil penelitian (Rusdi, 2023) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

a. Strategi dan Program Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Strategi utama yang diterapkan meliputi:

- Pengurangan beban pengeluaran: Melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- Peningkatan pendapatan masyarakat: Melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Pengurangan kantong-kantong kemiskinan: Melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan akses layanan publik di daerah tertinggal.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran perlindungan sosial yang meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp496,8 triliun pada Tahun Anggaran 2024, termasuk Dana Desa sebesar Rp71 triliun untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa .

b. Evaluasi Efektivitas Kebijakan

Meskipun berbagai program telah dijalankan, efektivitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan masih menjadi perdebatan. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional menurun dari 16,7% pada 2004 menjadi 9,5% pada 2023. Namun, penurunan ini dianggap belum signifikan oleh

beberapa pihak. Misalnya, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa selama satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan hanya turun sekitar 2%, menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan belum efektif sepenuhnya (Republik online, 2024).

Kemudian Badan Kebijakan Fiskal mencatat bahwa meskipun alokasi anggaran untuk program seperti PKH meningkat, kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan belum optimal (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2018).

c. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia meliputi:

- Ketepatan sasaran: Masih terdapat masalah dalam penentuan sasaran program, di mana bantuan sosial tidak selalu tepat sasaran.
- Keterbatasan data: Data yang kurang akurat dan terkini menghambat efektivitas program.
- Koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga menyebabkan program tidak berjalan secara sinergis.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) menyatakan bahwa untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, pemerintah perlu membenahi data sasaran kebijakan dan memastikan program penurunan tingkat kemiskinan tepat sasaran (Antara, 2023).

d. Implikasi terhadap Pencapaian SDGs

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memiliki implikasi langsung terhadap pencapaian SDGs, khususnya tujuan pertama: Menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan perbaikan dalam implementasi program, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan pembenahan data sasaran agar program lebih tepat guna dan efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2004–2024 mengalami penurunan secara umum, meskipun terdapat fluktuasi akibat faktor eksternal seperti pandemi COVID-19.
2. Secara parsial, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) perlu fokus pada

pengurangan pengangguran, penurunan ketimpangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

REFERENSI

- Aini, S. N., & Nugroho, R. yuwono Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.19474>
- Antara. (2023). *CORE: Sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem perlu dibenahi*. https://www.antaraneews.com/berita/3668799/core-sasaran-kebijakan-pengentasan-kemiskinan-ekstrem-perlu-dibenahi?utm_source=chatgpt.com
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2018). *Spending Review Program Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi Efektivitas Program BanSos*.
- BPS. (2024). *Statistik Kemiskinan di Indonesia 2004–2023*. BPS.
- Di, K., Bima, K., Romzi, A. S., Purnama, A., & Nusamuda, I. (2024). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Tingkat. 13, 665–672.
- Hafni, R. (2024). *Statistika Ekonomi*. Perdana Publishing.
- Hastina Febriaty, & Nurwani. (2017). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(2). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/1235>
- Jhingan M.L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers.
- Karolinska, B., Panjaitan, I., & Simamora, R. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks PEmangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan Propinsi Sumatera Utar. *Jurnal Promosi Jurnal Pendidikan EKonomi UM Metro*, 11(2), 213–225.
- Kasman, A., Ode, W., Ariani, R., & Oleo, U. H. (2013). *Studi pengaruh ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi sulawesi tenggara*. 09, 8–17.
- Maryam dkk. (2023). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Indeks Pembangunan Manusia*. 8(30), 1418–1428.
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., Tajuddin, Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 82–95. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>
- MP Todaro. (2015). *Ekonomi Makro*. Rajawali Pers.
- Nurlaili, A., Wardani, K., & Pasya, D. J. (2023). *Pengaruh indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap tingkat kemiskinan di provinsi lampung*. 6–11.
- Rahayu, S. E., & dkk. (2020). *Perekonomian Indonesia*. Perdana Publishing.

- Republik online. (2024). *Indef Ungkap Kinerja Program Bansos, Tak Efektif Turunkan Kemiskinan?*
https://ekonomi.republika.co.id/berita/sivou1490/indef-ungkap-kinerja-program-bansos-tak-efektif-turunkan-kemiskinan?utm_source=chatgpt.com
- Rusdi, M. (2023). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Index Pembangunan Kemiskinan di Sulawesi Selatan Manusia Terhadap*. 4(1), 971–981.
- Sri Endang Rahayu; dkk. (2016). *Pengantar Ekonomi Makro*. Perdana Publishing.
- Sukirno, S. (2014). *Makroekonomi: Teori Pengantar dan Masalah Ekonomi Makro*. Rajawali Pers.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020*. United Nations Development Programme.
- Zahra, B. S., & dkk. (2024). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Pada Priode*. 3.